JAHPB: Journal of Social Humanities, Education and Business
Volume 1 Number 5, September (2026)



Tata Kelola Keuangan Pendidikan: Strategi Perencanaan, Pengelolaan, Transparansi, dan Akuntabilitas Pembiayaan Pendidikan

Rina Marlina[1*], Marni[2], Nike Firmadeli[3],Rifqa Nissa Aulia[4]

Madrasah Tsanawiyah Darul Nadhah[1,2]
Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Ikhwan[3,4]

Email: *rinasaja895@gmail.com*,tmarni1988@gmail.com, nikefirmadelispd92@gmail.com, rifqanissa280494@gmail.com*

Riwayat Artikel

Dikirim: July 4 2026
Direvisi: Agustus 25 2026
Diterima: September 3 2026
Dipublikasi: September 25 2026

Kata Kunci:

tata kelola keuangan pendidikan; pembiayaan pendidikan; perencanaan anggaran; transparansi; akuntabilitas; mutu pendidikan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan praktik tata kelola keuangan pendidikan yang mencakup aspek perencanaan anggaran, sumber pembiayaan, pengelolaan keuangan, pengawasan, serta akuntabilitas dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui penelaahan berbagai literatur, artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen yang relevan dengan administrasi serta pengelolaan keuangan pendidikan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis terhadap berbagai konsep dan temuan penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa tata kelola keuangan pendidikan merupakan instrumen strategis dalam menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan dan pencapaian tujuan kelembagaan. Pengelolaan keuangan yang efektif melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pencatatan, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi anggaran secara terpadu. Sumber pembiayaan pendidikan dapat berasal dari pemerintah, masyarakat, orang tua peserta didik, serta instrumen pendanaan alternatif seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selain itu, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi menjadi landasan penting dalam mencegah penyimpangan penggunaan anggaran serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola keuangan pendidikan memerlukan sistem pengelolaan yang profesional, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan agar sumber daya keuangan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan mutu layanan dan kualitas pendidikan

Keywords:

educational financial governance; educational financing; budget planning; transparency; accountability; educational quality

Abstract

This study aims to analyze the concepts and practices of educational financial governance, particularly in relation to budget planning, funding sources, financial management, supervision, and accountability in improving educational quality. This study employs a qualitative approach using the library research method. Data were collected through an examination of relevant academic literature, scholarly journal articles, books, and documents concerning educational financial administration and management. The data were analyzed using descriptive qualitative analysis through identification, classification, interpretation, and synthesis of relevant concepts and previous research findings. The findings indicate that educational financial governance

serves as a strategic instrument for ensuring the sustainability of educational institutions and achieving institutional objectives. Effective financial management involves an integrated process of planning, organizing, implementing, recording, monitoring, reporting, and evaluating educational budgets. Educational funding sources may originate from central and local governments, communities, parents, and alternative financing instruments, including zakat, infaq, sadaqah, and waqf. Furthermore, the implementation of transparency, accountability, effectiveness, and efficiency is essential to preventing financial mismanagement and strengthening stakeholder trust. This study concludes that strengthening educational financial governance requires a professional, participatory, transparent, and sustainable management system. Such a system enables educational institutions to optimize their financial resources, improve service delivery, strengthen institutional accountability, and ultimately enhance the overall quality of education.

OPEN ACCESS

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) license

PENDAHULUAN

Dana memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pendidikan karena menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberlangsungan, efektivitas, dan kualitas pelayanan pendidikan. Dalam perspektif ekonomi pendidikan, pembiayaan pendidikan berkaitan erat dengan pengeluaran masyarakat secara keseluruhan, kebijakan fiskal pemerintah, serta alokasi anggaran publik untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Sumber pendanaan pendidikan tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga melibatkan kontribusi masyarakat, keluarga, dan lembaga donor. Oleh karena itu, pengelolaan dana pendidikan harus memperhatikan prinsip kecukupan, pemerataan, efisiensi, dan keberlanjutan agar seluruh peserta didik memperoleh kesempatan pendidikan yang berkualitas. World Bank dan UNESCO (2024) menegaskan bahwa peningkatan anggaran pendidikan perlu disertai dengan pengelolaan keuangan publik yang lebih efektif dan berkeadilan. Selain itu, penguatan penerimaan negara melalui kebijakan perpajakan juga menjadi salah satu aspek penting dalam menjamin keberlanjutan pembiayaan pendidikan (SDG4 High-Level Steering Committee, 2025).

Pada tingkat kelembagaan, administrasi dan pengelolaan keuangan pendidikan berkaitan langsung dengan kebijakan institusi dalam mengimplementasikan berbagai bentuk pelayanan kepada peserta didik. Keuangan lembaga pendidikan harus dikelola secara terencana agar kebutuhan operasional, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat terpenuhi secara optimal. Pengelolaan tersebut mencakup penyusunan anggaran, penentuan skala prioritas, pengalokasian dana, pelaksanaan pembiayaan, hingga evaluasi penggunaan anggaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Hasnida dan Astuti (2024) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan sekolah meliputi perencanaan anggaran, pengalokasian dana, pencatatan keuangan, dan pertanggungjawaban keuangan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, Pantas dan Fitriana (2024) menekankan pentingnya kesesuaian alokasi anggaran, ketepatan sasaran penggunaan dana, serta transparansi dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan.

Administrasi dan pengelolaan keuangan pendidikan pada dasarnya merupakan serangkaian aktivitas manajerial yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh sumber daya keuangan lembaga pendidikan. Proses tersebut dimulai dari upaya memperoleh dan menetapkan sumber dana, menyusun rencana penggunaan anggaran, melaksanakan transaksi keuangan, hingga melakukan pencatatan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran secara sistematis. Selain itu, administrasi keuangan juga mencakup pengelolaan dokumen transaksi, penyusunan laporan keuangan, pengendalian internal, serta pemenuhan kewajiban perpajakan dan ketentuan administratif yang relevan dengan aktivitas kelembagaan. Suhendro dan Halim (2024) menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi,

.

pengendalian internal, dan akuntabilitas keuangan memiliki keterkaitan dengan peningkatan kinerja perguruan tinggi. Sementara itu, Akhyar (2024) menegaskan bahwa transparansi, keterlibatan pemangku kepentingan, pelatihan pengelolaan keuangan, dan pemeriksaan keuangan merupakan aspek penting dalam membangun tata kelola keuangan lembaga pendidikan yang bertanggung jawab.

Meskipun demikian, pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber pendanaan, ketidakseimbangan distribusi anggaran, rendahnya kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan, serta belum optimalnya sistem pengawasan dan transparansi. Handayani et al. (2024) mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran dapat menjadi hambatan dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja pada perguruan tinggi swasta di Indonesia. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada pencatatan pemasukan dan pengeluaran, tetapi harus diarahkan pada pencapaian tujuan institusi, peningkatan mutu layanan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Heriyanto et al. (2026) menekankan pentingnya perencanaan anggaran berbasis data, pengawasan internal, pelaporan keuangan yang transparan, serta penguatan sistem pengendalian untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pembiayaan pendidikan. Dengan demikian, administrasi dan pengelolaan keuangan pendidikan perlu dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar seluruh sumber daya keuangan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang berorientasi pada pengumpulan, penelaahan, dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, prosiding ilmiah, serta dokumen-dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian. Pendekatan ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data secara langsung melalui observasi lapangan, melainkan pada pemahaman dan interpretasi terhadap informasi, konsep, teori, serta temuan penelitian yang telah dipublikasikan. Haryono et al. (2024) menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan menempatkan literatur dan dokumen sebagai sumber utama dalam memperoleh informasi ilmiah tanpa harus melakukan penelitian lapangan. Sejalan dengan itu, Chigbu et al. (2023) menegaskan bahwa kajian literatur merupakan proses evaluasi terhadap hasil penelitian terdahulu untuk membangun pemahaman konseptual dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang tertentu.

Pengumpulan data dilakukan melalui proses penelusuran, identifikasi, seleksi, pembacaan, dan pencatatan berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran literatur diarahkan pada publikasi ilmiah yang memiliki keterkaitan substantif dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, dengan mempertimbangkan kredibilitas sumber, relevansi pembahasan, serta keterbaruan informasi. Selanjutnya, bahan pustaka yang telah terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tema, konsep, teori, dan hasil penelitian yang memiliki kesamaan maupun perbedaan perspektif. Setiap sumber yang digunakan ditelaah secara cermat untuk memperoleh informasi penting, argumentasi ilmiah, serta temuan yang dapat dijadikan landasan dalam menjawab permasalahan penelitian. Menurut Libório et al. (2023), proses kajian literatur memerlukan tahapan yang terstruktur dalam mengidentifikasi, memilih, menganalisis, dan menyintesiskan berbagai publikasi agar menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Bandara dan Syed (2024) juga menekankan pentingnya kejelasan strategi penelusuran, kriteria pemilihan sumber, serta prosedur pengorganisasian literatur untuk meningkatkan kualitas dan ketertelusuran proses penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif melalui interpretasi, komparasi, dan sintesis terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka. Proses analisis diawali dengan mengorganisasikan data berdasarkan tema dan fokus pembahasan, kemudian mengidentifikasi keterkaitan antarkonsep, persamaan dan perbedaan pandangan para ahli, serta perkembangan temuan penelitian terdahulu. Selanjutnya, hasil penelaahan disajikan secara kritis dan dialogis, yaitu dengan tidak hanya mendeskripsikan atau mengutip pendapat para penulis, tetapi juga

memberikan penilaian, interpretasi, dan argumentasi ilmiah terhadap gagasan yang dikemukakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti membangun hubungan antargagasan, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan (*research gap*), serta merumuskan pemahaman baru berdasarkan sintesis literatur. Chigbu et al. (2023) menegaskan bahwa kajian kepustakaan yang berkualitas harus mencakup kegiatan membaca, merangkum, menganalisis, menginterpretasikan, dan menyintesiskan temuan penelitian terdahulu. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan menghasilkan pembahasan yang sistematis, objektif, argumentatif, dan memiliki landasan akademik yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan, pembahasan mengenai administrasi dan pengelolaan keuangan pendidikan dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu konsep dasar administrasi keuangan pendidikan, ruang lingkup pengelolaan keuangan, sumber pembiayaan pendidikan, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, bentuk pengeluaran, serta proses perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Keenam aspek tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan merupakan bagian integral dari manajemen lembaga pendidikan karena berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, pelaksanaan program, kualitas pelayanan pendidikan, dan pencapaian tujuan institusi. Hasil kajian juga memperlihatkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam merencanakan, mengalokasikan, menggunakan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan setiap sumber pendanaan secara sistematis.

1. Konsep Dasar Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Administrasi dan pengelolaan keuangan pendidikan merupakan serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan proses memperoleh, merencanakan, mengalokasikan, menggunakan, mencatat, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan hasil kajian, administrasi keuangan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan pencatatan pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga sebagai instrumen manajerial untuk memastikan bahwa seluruh sumber pendanaan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan mencakup dimensi administratif sekaligus strategis karena setiap keputusan anggaran berpengaruh terhadap keberlangsungan kegiatan pembelajaran, penyediaan fasilitas, pengembangan tenaga pendidik, dan peningkatan mutu pendidikan.

Konsep tersebut sejalan dengan pemikiran bahwa pengelolaan keuangan pendidikan harus mengintegrasikan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Setiap fungsi memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan karena kelemahan dalam satu tahapan dapat memengaruhi efektivitas keseluruhan pengelolaan keuangan. Perencanaan yang tidak didasarkan pada kebutuhan nyata, misalnya, berpotensi menghasilkan alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran. Sebaliknya, perencanaan yang disertai pelaksanaan dan pengawasan secara konsisten dapat membantu lembaga pendidikan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Oleh sebab itu, administrasi keuangan harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pencapaian tujuan kelembagaan, bukan sekadar aktivitas teknis pembukuan.

2. Ruang Lingkup Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Ruang lingkup administrasi dan pengelolaan keuangan pendidikan mencakup beberapa kegiatan utama yang saling berhubungan, yaitu perencanaan anggaran (*budgeting*), pengorganisasian, pelaksanaan keuangan (*accounting*), serta pelaporan dan pemeriksaan (*auditing*). Perencanaan anggaran merupakan tahap awal untuk menentukan kebutuhan pembiayaan berdasarkan program dan prioritas lembaga pendidikan. Pada tahap ini, pengelola pendidikan menyusun rencana pendapatan dan belanja dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional, pengembangan fasilitas, peningkatan kompetensi pendidik, dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pengorganisasian dilakukan dengan menetapkan pembagian tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta mekanisme pengalokasian dana agar pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana. Handayani et al. (2024) menjelaskan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah membutuhkan perencanaan anggaran secara kolaboratif, pengawasan penggunaan dana, serta keterlibatan pimpinan dan bendahara dalam mengendalikan penerimaan maupun pengeluaran keuangan.

.

Pelaksanaan administrasi keuangan dilakukan melalui pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran secara sistematis, penyimpanan bukti transaksi, pengelolaan kas, serta penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, pelaporan dan pemeriksaan keuangan bertujuan memastikan bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan perencanaan, ketentuan administrasi, dan kebutuhan lembaga pendidikan. Pemeriksaan tersebut dapat mencakup audit laporan keuangan, audit operasional, dan audit kepatuhan. Audit laporan keuangan berorientasi pada kewajaran penyajian informasi keuangan, audit operasional menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, sedangkan audit kepatuhan memastikan kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan peraturan yang berlaku. Dahlan et al. (2024) menegaskan bahwa audit keuangan pada lembaga pendidikan berperan penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan dana sekaligus mencegah penyalahgunaan anggaran. Dengan demikian, seluruh ruang lingkup administrasi keuangan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan proses manajemen yang berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan.

3. Sumber-Sumber Pembiayaan Pendidikan

Hasil kajian menunjukkan bahwa sumber pembiayaan pendidikan berasal dari berbagai pihak yang memiliki tanggung jawab dan kepentingan terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Secara umum, sumber pendanaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dana pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua peserta didik, masyarakat, serta sumber pendanaan alternatif lainnya. Dana pemerintah digunakan untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan, pemenuhan kebutuhan operasional, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan. Sementara itu, kontribusi orang tua dan masyarakat dapat berbentuk dukungan finansial, sumbangan sukarela, maupun partisipasi dalam pengembangan fasilitas dan program kelembagaan. Penelitian Wuryandoko et al. (2024) menunjukkan bahwa pemenuhan sumber pembiayaan pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Blora berasal dari tiga sumber utama, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberlanjutan pembiayaan pendidikan membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, bukan hanya bergantung pada satu sumber pendanaan.

Selain sumber pendanaan konvensional, lembaga pendidikan Islam memiliki peluang untuk mengembangkan pembiayaan alternatif melalui instrumen filantropi Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Wakaf produktif dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan aset kelembagaan yang menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan, sedangkan dana zakat, infak, dan sedekah dapat dikelola melalui mekanisme penyaluran yang sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, lembaga pendidikan dapat mengembangkan unit usaha mandiri, koperasi, dan kerja sama ekonomi dengan masyarakat maupun pihak swasta untuk memperkuat kemandirian finansial. Bundo et al. (2025) menjelaskan bahwa wakaf memiliki potensi strategis sebagai sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pendidikan Islam, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kesejahteraan pendidik. Sejalan dengan itu, Desrita dan Karim (2025) menunjukkan bahwa optimalisasi aset lembaga, pengelolaan wakaf produktif, pemanfaatan dana ZIS, dan pembentukan unit usaha mandiri dapat memperkuat stabilitas keuangan serta mengurangi ketergantungan lembaga pendidikan Islam terhadap pendanaan eksternal.

4. Prinsip-Prinsip Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Administrasi dan pengelolaan keuangan pendidikan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Keempat prinsip tersebut menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa setiap sumber dana dikelola secara terbuka, bertanggung jawab, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pendidikan. Transparansi mengandung makna keterbukaan lembaga pendidikan dalam menyampaikan informasi mengenai sumber penerimaan, jumlah anggaran, rencana penggunaan, realisasi pengeluaran, dan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip ini diperlukan untuk membangun kepercayaan antara pengelola pendidikan, pemerintah, orang tua peserta didik, komite sekolah, dan masyarakat. Wijaya et al. (2024) menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana. Oleh karena itu, transparansi bukan hanya berkaitan dengan penyediaan laporan keuangan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran pendidikan.

Prinsip akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pengelola keuangan untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan penggunaan dana berdasarkan perencanaan serta ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas diwujudkan melalui pencatatan transaksi yang tertib, dokumentasi penggunaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, dan pelaksanaan pemeriksaan secara berkala. Selanjutnya, efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan dan program pendidikan yang telah ditetapkan. Sementara itu, efisiensi berkaitan dengan kemampuan lembaga dalam memanfaatkan sumber daya keuangan, waktu, tenaga, dan fasilitas secara optimal untuk memperoleh hasil yang maksimal. Pantas dan Fitriana (2024) menjelaskan bahwa efektivitas pembiayaan pendidikan perlu memperhatikan kesesuaian alokasi anggaran, ketepatan sasaran penggunaan dana, dan transparansi pengelolaan. Hal tersebut diperkuat oleh Dahlan et al. (2024) yang menempatkan audit sebagai instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. Dengan demikian, penerapan keempat prinsip tersebut menjadi dasar untuk membangun tata kelola keuangan pendidikan yang profesional, kredibel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

5. Bentuk-Bentuk Pengeluaran Keuangan Pendidikan

Pengeluaran keuangan pendidikan merupakan seluruh biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan agar dapat berjalan secara teratur dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil kajian, bentuk pengeluaran keuangan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Biaya investasi merupakan pengeluaran jangka panjang yang digunakan untuk pengadaan dan pengembangan sarana serta prasarana pendidikan, pembelian peralatan pembelajaran, pembangunan gedung, pengembangan sumber daya manusia, dan penyediaan modal kerja tetap. Biaya operasional merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan sehari-hari, seperti pembayaran gaji pendidik dan tenaga kependidikan, tunjangan, pengadaan bahan habis pakai, pemeliharaan fasilitas, biaya listrik, air, transportasi, administrasi, pajak, dan kebutuhan pendukung pembelajaran lainnya. Adapun biaya personal merupakan pengeluaran yang ditanggung peserta didik atau keluarga untuk mendukung keikutsertaan dalam proses pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Klasifikasi tersebut memperlihatkan bahwa pembiayaan pendidikan harus memperhatikan kebutuhan kelembagaan sekaligus beban pembiayaan yang ditanggung peserta didik dan keluarganya.

Pengalokasian pengeluaran keuangan harus didasarkan pada skala prioritas dan keterkaitan antara anggaran dengan kebutuhan nyata lembaga pendidikan. Pengeluaran untuk kegiatan pembelajaran, kesejahteraan tenaga pendidik, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia harus memperoleh perhatian yang proporsional. Selain itu, lembaga pendidikan perlu menghindari pemborosan, pengadaan barang yang tidak diperlukan, dan penggunaan anggaran untuk kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tujuan pendidikan. World Bank dan UNESCO (2024) menjelaskan bahwa peningkatan belanja pendidikan perlu diikuti dengan penguatan efisiensi dan pemerataan alokasi agar sumber daya keuangan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan pengeluaran pendidikan tidak hanya diukur berdasarkan besarnya anggaran yang telah direalisasikan, tetapi juga berdasarkan kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan, kualitas layanan, dan hasil pendidikan yang dicapai.

6. Proses Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Proses administrasi dan pengelolaan keuangan pendidikan diawali dengan penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) sebagai pedoman strategis dalam menentukan arah pengembangan lembaga pendidikan. Rencana tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kondisi kelembagaan, kebutuhan pendidikan, prioritas pengembangan, serta target yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Berdasarkan perencanaan strategis tersebut, lembaga pendidikan kemudian menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagai instrumen operasional untuk menghubungkan program kerja dengan kebutuhan pembiayaan. Penyusunan RKAS perlu mempertimbangkan ketersediaan sumber dana, prioritas program, kebutuhan peserta didik, serta kemampuan keuangan lembaga. Wuryandoko et al. (2024) menjelaskan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu perencanaan pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan, dan evaluasi pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan pelaksanaan dan evaluasi agar penggunaan dana tidak menyimpang dari tujuan kelembagaan.

.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran yang meliputi penerimaan dana, pengalokasian anggaran, pengadaan kebutuhan pendidikan, pembayaran berbagai pengeluaran, dan pencatatan seluruh transaksi keuangan. Setiap pengeluaran harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan serta didukung bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan administrasi yang berlaku. Proses pengawasan dapat melibatkan kepala sekolah, bendahara, tim pengelola keuangan, komite sekolah, dan instansi pendidikan terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing. Handayani et al. (2024) menunjukkan bahwa pengawasan pembiayaan pendidikan dilakukan melalui pemantauan penerimaan dan pengeluaran dana serta pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran oleh pimpinan dan pihak yang berwenang. Dengan demikian, pengawasan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa setiap kegiatan memperoleh dukungan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan.

Tahap terakhir adalah pelaporan dan evaluasi keuangan yang bertujuan menilai kesesuaian antara perencanaan anggaran, realisasi penggunaan dana, dan hasil pelaksanaan program pendidikan. Pelaporan harus menyajikan informasi mengenai jumlah penerimaan, pengeluaran, sisa anggaran, serta penggunaan dana berdasarkan masing-masing program. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan kelemahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagai dasar perbaikan perencanaan pada periode berikutnya. Dahlan et al. (2024) menegaskan bahwa pemeriksaan keuangan secara berkala dapat membantu lembaga pendidikan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan, mengurangi risiko penyalahgunaan dana, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, proses pengelolaan keuangan pendidikan merupakan siklus berkelanjutan yang mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi untuk menjamin keberlangsungan serta peningkatan kualitas pendidikan.

7. Tantangan dan Strategi Penguatan Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Meskipun administrasi dan pengelolaan keuangan memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan tersebut meliputi keterbatasan sumber pendanaan, ketimpangan distribusi anggaran antardaerah, ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, keterbatasan kompetensi pengelola keuangan, serta belum optimalnya pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran. Sumiyana dan Effendi (2024) menemukan bahwa sistem penganggaran pendidikan di Indonesia masih menghadapi persoalan rendahnya kemampuan adaptasi dalam mendistribusikan anggaran secara lebih merata. Ketidaksesuaian antara mekanisme pengalokasian anggaran dan kebutuhan daerah dapat menyebabkan perbedaan kemampuan lembaga pendidikan dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pembiayaan pendidikan perlu mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, dan kapasitas masing-masing wilayah agar distribusi anggaran lebih adil dan tepat sasaran.

Strategi penguatan administrasi dan pengelolaan keuangan pendidikan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem pengawasan internal, penyusunan anggaran berbasis kebutuhan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan dana. Selain itu, lembaga pendidikan perlu mengembangkan diversifikasi sumber pendanaan agar tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber keuangan. Dalam konteks pendidikan Islam, optimalisasi wakaf produktif, zakat, infak, sedekah, dan unit usaha mandiri dapat menjadi alternatif untuk memperkuat kemandirian ekonomi lembaga. Desrita dan Karim (2025) menegaskan bahwa pengembangan unit usaha produktif dan optimalisasi aset kelembagaan dapat memperkuat stabilitas finansial serta mendukung keberlanjutan program pendidikan jangka panjang. Namun, pengembangan sumber pendanaan alternatif tersebut harus disertai dengan kompetensi manajerial, pengendalian risiko, pencatatan keuangan yang tertib, dan pengawasan secara berkala.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat dipahami bahwa administrasi dan pengelolaan keuangan pendidikan tidak hanya berorientasi pada pengaturan pemasukan dan pengeluaran, tetapi merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola lembaga pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Keberhasilan pengelolaan keuangan ditentukan oleh keterpaduan antara perencanaan anggaran, ketersediaan sumber pendanaan, ketepatan alokasi, pelaksanaan program, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat kemampuan lembaga dalam memenuhi kebutuhan

pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang profesional, partisipatif, adaptif, dan berorientasi pada hasil agar setiap sumber daya keuangan benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu layanan dan pencapaian tujuan pendidikan.

KESIMPULAN

Administrasi keuangan adalah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan penggunaan biaya yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efesien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Unsur biaya adalah hal yang paling menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penetuan biaya sangat mempengaruhi tingkat efektivitas dan efisiensi lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik. Maka, kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Akhyar, Y. (2024). Public accountability in financial management practice at Islamic education institutions: A survey research. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan, 16*(3), 4127–4142. https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i3.4372

Handayani, E., Hapsari, I., & Pandansari, T. (2024). Performance-based budgeting or budgeting-based performance? *International Journal of Research in Business and Social Science, 13*(5), 643–648. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v13i5.3526

Hasnida, H., & Astuti, R. (2024). Manajemen keuangan sekolah dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan. *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam, 5*(2), 359–370. https://doi.org/10.54150/thawalib.v5i2.465

Heriyanto, H., Wasliman, I., Warta, W., & Prasetyo, Y. (2026). Education financing management in improving the quality of financial management accountability. *International Journal of Nusantara Islam, 14*(1), 87–104. https://doi.org/10.15575/ijni.v14i1.49200

Pantas, P. E., & Fitriana, D. (2024). From allocation to impact: Evaluating the effectiveness of school budget models in Indonesia. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, 12*(2), 89–96. https://doi.org/10.21831/jamp.v12i2.81829

SDG4 High-Level Steering Committee. (2025). *Strengthening domestic resource mobilization to enable increased investments in education: Aligning tax reform and education financing goals* [Background document]. UNESCO. https://www.unesco.org/sdg4education2030/sites/default/files/medias/fichiers/2025/08/HLSC%20Background%20document_Aug%202025_EN.pdf

Suhendro, S., & Halim, A. (2024). Strengthening higher education performance through a system of financial accountability and quality assurance. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 13*(5), 340–351. https://doi.org/10.36941/ajis-2024-0169

World Bank, & UNESCO. (2024). *Education finance watch 2024*. https://doi.org/10.54676/NSCT2115

Bandara, W., & Syed, R. (2024). The role of a protocol in a systematic literature review. *Journal of Decision Systems, 33*(4), 583–600. https://doi.org/10.1080/12460125.2023.2217567

Chigbu, U. E., Atiku, S. O., & Du Plessis, C. C. (2023). The science of literature reviews: Searching, identifying, selecting, and synthesising. *Publications, 11*(1), Article 2. https://doi.org/10.3390/publications11010002

Haryono, E., Suprihatiningsih, S., Septian, D., Widodo, J., Ashar, A., & Sariman. (2024). New

.

paradigm metode penelitian kepustakaan (*library research*) di perguruan tinggi. *An-Nuur, 14*(1). https://doi.org/10.58403/annuur.v14i1.391

Libório, M. P., Martins, C. A. P. S., Laudares, S., & Ekel, P. I. (2023). Method of preparing an international and national literature review for novice researchers. *MethodsX, 10*, Article 102165. https://doi.org/10.1016/j.mex.2023.102165

undo, M., Sakinah, G., & Suratman, J. (2025). The role of waqf as an instrument of Islamic philanthropy in financing Islamic education. *Jurnal Iqtisaduna, 11*(1), 197–207. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i1.53269

Dahlan, M. Anas, Listiana Sri Mulatsih, Alfiana, & Abdul Kadir Ahmad. (2024). Financial management audits for school quality improvement in Indonesia: A comprehensive literature review. *Journal of Educational Management and Instruction, 4*(1), 174–184. https://doi.org/10.22515/jemin.v4i1.9556

Desrita, H., & Karim, H. A. (2025). Sistem pembiayaan pendidikan Islam berbasis kemandirian ekonomi lembaga. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10*(4), 300–314. https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.37128

Handayani, K., Setiyono, P., Dewi, D. N., & Nurkolis. (2024). Educational financing management in state vocational schools. *Lembaran Ilmu Kependidikan, 53*(1), 97–106. https://doi.org/10.15294/lik.v53i1.4653

Pantas, P. E., & Fitriana, D. (2024). From allocation to impact: Evaluating the effectiveness of school budget models in Indonesia. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, 12*(2), 89–96. https://doi.org/10.21831/jamp.v12i2.81829

Sumiyana, S., & Effendi, R. (2024). Indonesia's education budgeting system denoting low adaptiveness: Functionalism analysis. *Cogent Social Sciences, 10*(1), Article 2393870. https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2393870

Wijaya, A. A., Supriyanto, S., Asih, M. S., & Nurkolis, N. (2024). Analysis of the effectiveness of management of school operational assistance funds in elementary schools. *Lembaran Ilmu Kependidikan, 53*(2), 233–242. https://doi.org/10.15294/lik.v53i2.5285

World Bank, & UNESCO. (2024). *Education finance watch 2024*. World Bank. https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/education-finance-watch